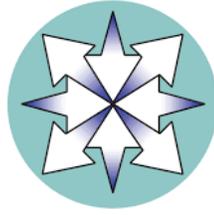


INFO DEWAN PERS



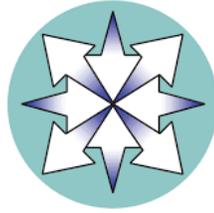
**DEWANPERS**

### **Dewan Pers Mendorong Keberlangsungan Pers Dijaga Bersama**

Jakarta, Senin. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR menyampaikan harapannya agar keberadaan pers yang menghadapi tantangan berat di era pandemi Covid-19 dan tekanan dari platform digital dijaga bersama-sama. DPR dapat menyampaikan kepada pemerintah mengenai urgensi menjaga keberadaan pers ini.

Agus Sudibyo dalam sidang dengan Komisi I DPR hari Senin (1/2) membahas kinerja tahun 2020 dan rencana program 2021. Agus menyampaikan hal itu ketika menjelaskan pentingnya keberlangsungan media (media sustainability) di Indonesia karena adanya beberapa perusahaan pers yang kesulitan di era Covid-19 dan juga kekuatan platform digital dari luar negeri yang menggerus “revenue” perusahaan pers.

Langkah-langkah strategis perlu dibuat oleh Dewan Pers dalam rangka menjaga keberlangsungan media ini masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Almasyhari meyakini bahwa Dewan Pers telah memiliki langkah-langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan media massa.



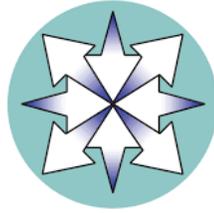
Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menjelaskan pentingnya menjaga keberlangsungan Media Massa di Komisi I DPR hari Senin (1/2)

### **Tekanan platform Digital dan Pandemi**

Mengenai tekanan terhadap situasi pers Indonesia, dalam laporan ke Komisi I DPR dijelaskan bahwa, Platform Digital telah merambah bisnis media, menguasai pasar iklan, mendominasi distribusi konten, tanpa regulasi yang tegas dan melindungi media nasional. Disebutkan pula, Google, Facebook menguasai 75-80% dari total belanja iklan digital nasional. Media nasional hanya mendapatkan sisanya. *Readership* dan oplah media terus menurun.

Selain tekanan dari platform digital, dalam laporan ke DPR dijelaskan pula mengenai Daya Hidup Pers Nasional yang Menghadapi Krisis Pandemi COVID-19. Data dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyebutkan, 71% perusahaan pers cetak mengalami penurunan omzet lebih dari 40% (Januari-April 2020) dibandingkan tahun

## INFO DEWAN PERS



## DEWANPERS

2019. Selain itu 50% perusahaan pers cetak telah memotong gaji karyawan dengan besaran 2-30%.

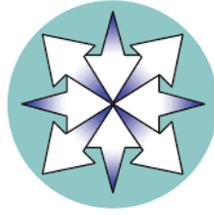
Selanjutnya dari SPS juga dilaporkan bahwa 43,2% perusahaan pers cetak mengambil opsi merumahkan karyawan tanpa digaji, dengan kisaran jumlah karyawan yang dirumahkan antara 25-100 orang setiap perusahaan. Perusahaan pers daerah (38,6%) lebih cenderung mengambil opsi kebijakan ini dibandingkan dengan perusahaan pers nasional (4,45%). Dan 38,6% perusahaan pers cetak sudah dan atau berencana melakukan PHK karyawan. Jumlah karyawan yang sudah maupun yang dalam proses PHK berkisar 25-100 orang pada setiap perusahaan.

Sedangkan data dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia yang beranggotakan 600 radio, pendapatan (revenue) radio dalam kondisi normal: 60% penjualan iklan & 40% dari kegiatan off air. Setelah Pandemi Covid-19: Revenue off air hilang total, karena izin kegiatan/mengumpulkan massa dilarang Revenue iklan berkurang 70%, karena banyak klien radio tutup sementara (penerbangan, hotel, travel, resto & cafe, bioskop, tempat hiburan, mall, transportasi, pertunjukan dll) Biaya pemasangan iklan yg sudah jatuh tempo belum bisa ditagih, karena kantor klien tutup.

Lebih rinci lagi dalam laporan Dewan Pers kepada DPR dikatakan bahwa Hingga Juli 2020, 30% radio sudah melakukan pemotongan gaji, 60% radio sudah mengurangi jam siaran dan hampir semua mengurangi daya pancar. Selain itu banyak radio menunda pengeluaran (rental, pengembangan, insentif, bonus, kenaikan gaji, riset, promosi, dll). Dan juga semakin banyak radio merumahkan karyawan.

Mengenai perusahaan media siber, data dari AMSI menyebutkan, revenue turun 25-80%. Dan 20% media online sudah melakukan pemotongan gaji dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Disebutkan pula bahwa 15% media online sudah menunda pembayaran gaji, dengan durasi penundaan yang bervariasi. Dalam laporan

## INFO DEWAN PERS



## DEWANPERS

AMSI itu juga dikatakan bahwa daya tahan cash flow dan potensi penerimaan anggota terhadap pandemi hanya hingga November-Desember 2020.

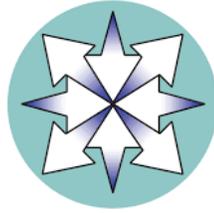
Mengenai televisi lokal, dilaporkan bahwa revenue turun drastis karena pengiklan yang enggan produk disandingkan dengan berita-berita mengenai virus corona. Anggaran Pemda yang biasanya untuk media televisi lokal sudah direalokasikan untuk penanganan pandemi. Namun perusahaan tetap harus mempertahankan produktivitas dengan memenuhi permintaan klien/pemirs. Akibatnya banyak televisi lokal mengurangi produksi hingga PHK Karyawan.

### **Kontribusi Pers**

Catatan Dewan Pers, di tengah masalah yang dihadapi, Pers tetap berupaya menjalankan peran dan kontribusinya, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sebanyak 434 Perusahaan Media Cetak anggota SPS telah menayangkan iklan layanan masyarakat dalam mensosialisasikan social distancing, jangan mudik, cuci tangan dll yang jika dinominalkan mencapai Rp 120 miliar. Televisi Lokal anggota ATVLI juga melakukan hal yang sama dengan nilai Rp 90 miliar. Kontribusi Media Online (972 media anggota AMSI dan SMSI) juga signifikan.

Sementara dukungan Media Radio Dalam Melawan Pandemi Covid-19 juga signifikan. Dalam laporan Dewan Pers ke DPR disebutkan bahwa media radio menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Kementerian Komunikasi dan Informatika “PEDULI LINDUNGI” 90.000 spot. Media Radio juga menyiarkan ILM Kementerian Kesehatan “JAGA JARAK, CUCI TANGAN, PAKAI MASKER” 90.000 spot. Tambahan lainnya menyiarkan ILM Presiden RI “Indonesia Bisa Mengatasi Corona” 90.000 spot dan menyiarkan ILM Presiden RI “Bekerja, Belajar dan Ibadah dari Rumah” 90.000 spot. Bahkan media Radio juga menyiarkan ILM

## INFO DEWAN PERS



## DEWANPERS

“JANGAN MUDIKA” 90.000 spot dan menyiarkan ILM “IBADAH DIRUMAH” 90.000 spot. Dengan asumsi harga spot rata-rata Rp.300.000, maka nilai ILM yg sudah disiarkan PRSSNI sejak Maret – Mei 2020 adalah Rp 162 Miliar.

Sebagai laporan kepada DPR, Dewan Pers menjelaskan contoh nyata Kolaborasi Negara dan Pers melalui Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Kerjasama ini dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers. Merekrut 4300 wartawan untuk meliput pandemi dengan perspektif perubahan perilaku yang kondusif untuk penanggulangan pandemi covid 19. Setiap peserta mendapatkan insentif sekitar Rp. 2.175.000,- per bulan. Angka ini tidak sangat besar, tapi cukup untuk bertahan dalam situasi darurat.

Dalam program ini prioritas untuk wartawan yang terdampak pandemi atau terkena PHK dan wartawan tetap bekerja di media masing-masing. Kemudian juga tidak ada larangan untuk mengkritik pemerintah dan wartawan akan diarahkan menjadi contact tracer (melacak orang-orang yang berkemungkinan berinteraksi dengan orang terpapar virus covid-19 dalam dua minggu setelah orang yang terpapar terdeteksi). (Tim Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers)